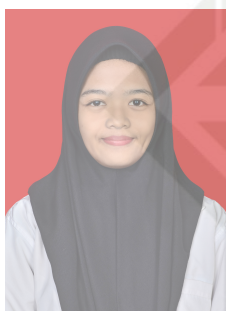


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
(*FINTech*) BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG  
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
PADA PT. FINANSIA MULTI  
FINANCE (KREDIT PLUS)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**SITI SHOLIHAH**

**NIM. 11527200020**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU - PEKANBARU**

**2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
(*FINTECH*) BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG  
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
PADA PT. FINANSIA MULTI  
FINANCE (KREDIT PLUS)**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**SITI SHOLIHAH**

**NIM. 11527200020**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU - PEKANBARU**

**2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus)*, yang ditulis oleh :

Nama : **SITI SHOLIHAH**  
 NIM : **11527200020**  
 Program Studi : **ILMU HUKUM**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 21 November 2019**  
 Waktu : **08.00 WIB**  
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2019 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Petua  
**Mhd. Kastulani, SH., MH**

Sekretaris  
**Nur Hidayat, SH., MH**

Penguji I  
**Ilham Akbar, SH., MH**

Penguji II  
**Peri Pirmansyah, SH., MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PT. FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS)", yang ditulis oleh:

Nama : Siti Sholihah

NIM : 11527200020

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 30 Oktober 2019  
Pembimbing Skripsi

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum  
NIP. 197205052014111002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. Finansia Multi Finance.**

Ditemukan sebuah masalah bahwa penyelenggara pada PT. Finansia Multi Finance terkadang tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait pembiayaan berbasis teknologi informasi, yang mana dalam hal tersebut bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara wajib memberikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, yang pertama bagaimana pelaksanaan pembiayaan berbasis *financial technology (fintech)* berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta bagaimana hubungan hukum antara para pihak pada *financial technology (fintech)* berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang mana pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan *fintech*, pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus), sedangkan objek nya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Data akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama Jika penyelenggara tidak memberikan informasi yang jelas sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 30 tersebut maka penyelenggara dapat dikenakan suatu perbuatan wanprestasi, dimana wanprestasi sendiri adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan salah satu pihak yang terikat dengan perjanjian baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi sendiri diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara. Serta Dalam hal hubungan hukum yang terjadi antara para pihak maka hubungan hukum pada *peer to peer lending* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ) harus dibedakan dengan hubungan hukum para pihak dalam perbankan. Agar tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan bank gelap (*shadow banking*). Oleh karena itu, hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara *peer to peer lending* haruslah bukan hubungan penyimpanan dana melainkan hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dalam hal ini merupakan hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam KUHPerdota. Kepastian hubungan hukum antara para pihak dalam *peer to peer lending* juga akan memberikan kedudukan hukum yang sah bagi penyelenggara *peer to peer lending*.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan kuasa-Nya yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus)”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Banyak sekali pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sukarno dan Ibu Darmini yang selalu berdoa untuk kesuksesan serta memberikan dukungan dan motivasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya dan seluruh civitas akademika.
3. Bapak Drs. H. Hajar Hasan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, M.A selaku wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta jajarannya.
5. Bapak Muslim, S.Ag., SH., M. Hum sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Asril, SHI, MH selaku pembimbing akademik yang memberikan nasihat dalam masa perkuliahan.
7. Seluruh responden pada penelitian ini, terima kasih atas waktu, informasi, dan data yang telah diberikan kepada penulis untuk kelengkapan skripsi ini.
8. Teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis, kemudian untuk sahabat-sahabat, penulis ucapkan ribuan terimakasih atas doa dan bantuan yang telah diberikan selama ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

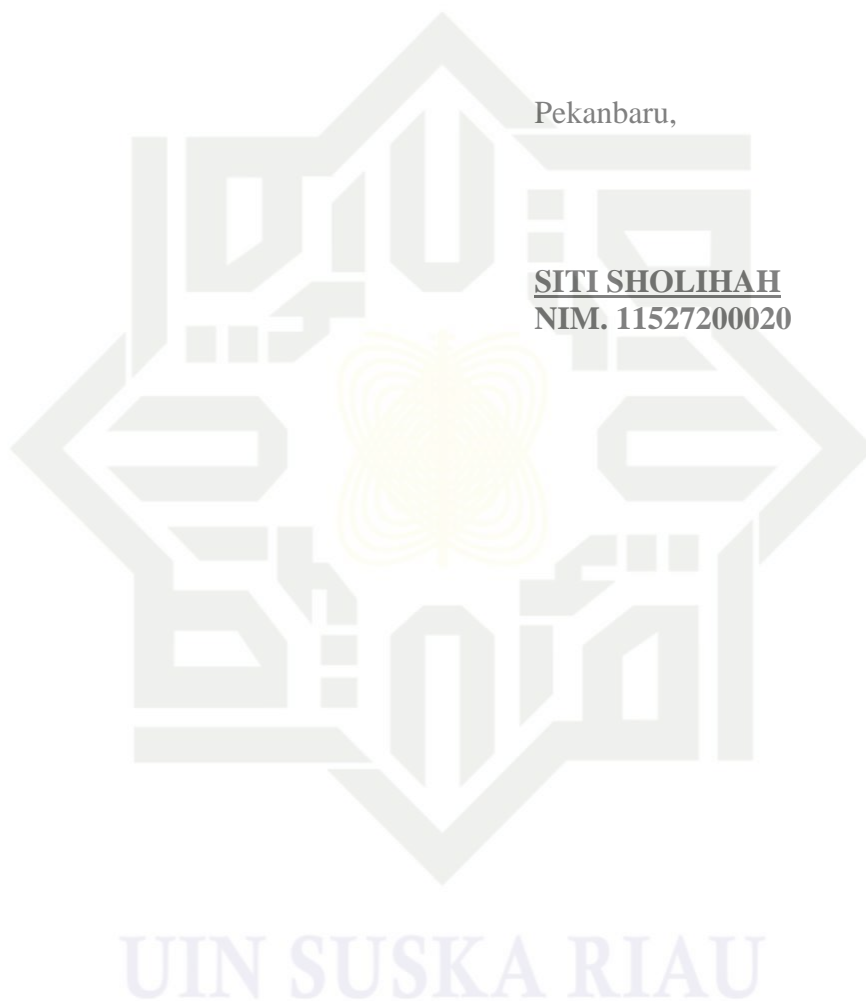
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda. Aamiin.

Pekanbaru,

2019

**SITI SHOLIHAH**  
**NIM. 11527200020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus).....	15
B. Otoritas Jasa Keuangan.....	17
<b>BAB III    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Lembaga Pembiayaan.....	21
B. Perkembangan <i>Financial Technology (Fintech)</i> .....	24
B. Konsep <i>Fintech</i> dan Implementasinya di Indonesia.....	31
C. Perbandingan <i>Financial Technology (Fintech)</i> dengan Bank Konvensional.....	37
D. Perjanjian Kredit dalam Sistem Perbankan.....	38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penjelasan Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai <i>Financial Technology (Fintech)</i> .....	45
---	----

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis <i>Financial Technology (Fintech)</i> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	48
B. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam <i>Financial Technology (Fintech)</i> Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	61

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

UIN SUSKA RIAU

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan sampel.....	11
Tabel III.1 Kategori mengenai segmen <i>fintech</i> .....	29
Tabel 1V.1 Evolusi <i>fintech</i> dari tahun ke tahun.....	49
Tabel 1V.2 Masyarakat mengetahui tentang <i>fintech</i> .....	55
Tabel 1V.3 Ketertarikan masyarakat dalam menggunakan <i>fintech</i> .....	56
Tabel 1V.4 Manfaat <i>fintech</i> bagi kehidupan sehari-hari.....	57
Tabel 1V.5 Peminjaman melalui <i>fintech</i> atau perbankan.....	58
Tabel 1V.6 Mengalami kerugian pada saat mengajukan pinjaman melalui <i>fintech</i> .....	59
Tabel VI. 7 Persentase kasus periode Januari s/d Desember 2018.....	65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia digital telah memberikan berbagai layanan yang memudahkan bagi masyarakat salah satunya yaitu dengan kehadiran layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending*. Melalui *peer to peer lending* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah kecil hingga besar dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *peer to peer lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi pada waktu dua puluh empat jam nonstop.

Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan terkait dan harus menjalani proses antri sampai menandatangani perjanjian kredit. Selain itu, pada layanan pinjam meminjam melalui *peer to peer lending* ada juga yang tidak mempersyaratkan adanya agunan, yang tentu saja hal ini berbeda dengan fasilitas kredit ataupun pembiayaan perbankan yang biasanya mempersyaratkan agunan.

Sistem *peer to peer lending* pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian di ikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep *peer to peer lending* karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Karena itu pemberi pinjaman harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Di Indonesia untuk mengatur mengenai pembiayaan berbasis teknologi informasi ini maka Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Platform-platform peer to peer lending* sejatinya telah ada dalam masyarakat. Sebagai contoh pada *platform* Kredit Plus yang merupakan sebuah produk dari PT. Finansia Multi Finance, *platform* home credit, dan *platform* tunaiku yang merupakan produk dari PT. Bank Amar Indonesia, dan lain sebagainya.

*Fintech* atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan *fintech* kebanyakan adalah perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan.<sup>1</sup> Perusahaan *fintech* di Indonesia sekarang memiliki potensi yang besar. Karena itu, *fintech* berkembang cepat ke berbagai sektor seperti *startup* pembayaran (*payment gateway*), manajemen keuangan (*wealth management*), pembiayaan (*crowdfunding*), dan peminjaman (*lending*).

Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan penting untuk dikembangkan. Kecepatan laju inovasi mengakibatkan berbagai perubahan dalam

<sup>1</sup>Ridwan Muchlis, 2018, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Medan*, jurnal At-Tawasuh volume. III, No.2 :335 – 357.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala aspek kehidupan dalam hal ini bidang keuangan termasuk sistem pembayaran, dimana perubahan tersebut semakin singkat yang berdampak pada semakin sempit *response time* otoritas untuk membuat kebijakan.

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding*.<sup>2</sup> Penerapan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, sebab pemanfaatan teknologi finansial tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan berbasis *online* dan penggunaan media internet untuk akses data digital.

*Peer to peer lending* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdara. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdara para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman

<sup>2</sup> Ratna Hartono, Juliyani Purnama, 2018, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal hukum ius quia iustum, volume 25, nomor 2 : 320-338.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer to peer lending* terdapat pihak lain yakni platform *peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak.

Meskipun perusahaan penyelenggara platform *peer to peer lending* memiliki kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari deposan dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* bukanlah perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Dalam sistem perbankan, hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank. Simpanan sendiri merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>4</sup>

Sebagai contoh *financial technology (fintech)* adalah kredit plus yang merupakan produk dari PT. Finansia Multi Finance. Dengan layanan yang disediakan

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>4</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 242.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh kredit plus adalah pembiayaan multi guna untuk berbagai macam produk elektronik dan furniture, dan pinjaman dana dengan agunan kendaraan untuk melengkapi berbagai kebutuhan pada masyarakat. Kredit plus bertujuan untuk menyediakan pembiayaan online, sebagai alternatif dari model peminjaman konvensional bank atau perusahaan pembiayaan lainnya.

Syarat untuk mengajukan peminjaman juga cukup mudah. Calon nasabah harus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia 21 tahun keatas, pegawai tetap dan kontrak maupun wiraswasta. Pada *platform* kredit plus ini memiliki jumlah pinjaman 2-20 juta dengan masa tenor hingga 36 bulan. Bunga pinjaman mulai 1,2% sampai dengan 1,4%.<sup>5</sup> Kredit plus berhubungan langsung dengan masyarakat yang tidak semua mengerti resiko yang bisa saja terjadi apabila meminjam uang melalui Kredit plus. Kebutuhan ekonomi yang mendesak bisa membuat seseorang tidak bijaksana dalam mengambil keputusan.

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini terkadang ada ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh *platform-platform financial teknologi (fintech)*, sehingga jika masyarakat yang memerlukan kebutuhan mendesak terkadang langsung menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh penyelenggara *fintech* tersebut tanpa memperhatikan syarat-syarat atau informasi lain terkait dengan apa yang akan terjadi pada kemudian hari. Padahal informasi di awal yang diberikan oleh penyelenggara

<sup>5</sup> <https://www.kreditplus.com/multiproduk> dilihat pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 16.36.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*fintech* tersebut terkadang berbeda dengan fakta setelah masyarakat melakukan kegiatan pembiayaan pada penyelenggara-penyelenggara *fintech* tersebut.

Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yakni penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.<sup>6</sup> Akan tetapi dalam faktanya masih banyak penyelenggara *fintech* yang belum memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang merasa setelah menggunakan layanan *fintech* tersebut merasa mengalami kerugian, contohnya seperti dalam melakukan promosi penyelenggara, *fintech* tidak memberi tahukan berapa denda yang akan dibayar jika mengalami keterlambatan, selain itu ada juga yang pencairan dana terkadang terlambat dicairkan oleh penyelenggara *fintech*, yang mana keterlambatan tersebut tidak dikonfirmasi terlebih dahulu oleh penyelenggara *fintech* kepada masyarakat yang melakukan peminjaman. Maka dari itu masyarakat banyak yang mendapatkan informasi yang tidak jelas oleh penyelenggara *fintech* yang mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun immateril kepada masyarakat.

<sup>6</sup> Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi pembahasan ini pada masalah aturan pada *financial teknologi (fintech)* yang memiliki informasi yang tidak jelas.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan berbasis *financial teknologi (fintech)* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak dalam *financial teknologi (fintech)* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan berbasis *financial teknologi (fintech)* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak dalam *financial teknologi (fintech)* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada program S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang keperdataan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan pemahaman mengenai *financial teknologi (fintech)*, sehingga dapat berguna bagi orang lain.

**E. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>7</sup> Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan berbasis

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*financial technology (fintech)*. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini tergolong kepada deskriptif analisis,<sup>8</sup> maksudnya penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembiayaan berbasis *financial technology (fintech)*.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau. Alasan memilih lokasi pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau karena lokasi tersebut merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor keuangan serta pada PT. Finansia Multi Finance sebagai penyelenggara dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan kegiatan pembiayaan berbasis *financial technology (fintech)* serta pegawai dari Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mengawasi sektor keuangan dan PT. Finansia Multi Finance. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

## 4. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian hukum.<sup>9</sup>

Sumber data dalam penulisan ini adalah :

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,<sup>10</sup> dengan cara mewancarai responden untuk memperoleh informasi dan penyebaran angket. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari masyarakat yang melakukan kegiatan pembiayaan berbasis *financial technology (fintech)* serta pegawai dari Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mengawasi sektor keuangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yaitu terdiri dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>11</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dengan menggunakan metode *total sampling* dalam menentukan sampel, maka *total sampling* adalah teknik pengambilan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>12</sup> Alasan mengambil *total sampling* karena jumlah populasi kurang dari 100 seluruh

<sup>9</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), h.281.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.30.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 107.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi dijadikan sampel penelitian semuanya. Populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Masyarakat yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan menggunakan <i>financial technology (fintech)</i>	30	30	100%
2.	Staf bagian pengawasan IKNB pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau	1	1	100%
3.	Pegawai pada PT. Finansia Multi Finance	2	2	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

### a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Angket

Peneliti mengumpulkan data dengan cara membagikan angket tertutup yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat yang melakukan *financial technology (fintech)*.

## c. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada responden untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

## d. Studi Pustaka

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pengertian dalam penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri sebagai berikut :



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II****: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum terhadap PT. Finansia Multi Finance dan Otoritas Jasa Keuangan.

**BAB III****: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang teori mengenai lembaga pembiayaan, perkembangan *financial technology (fintech)*, keuntungan dan kelemahan *financial technology (fintech)*, perbandingan *financial technology (fintech)* dengan bank konvensional, perjanjian kredit dalam sistem perbankan serta penjelasan tentang peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai *financial technology (fintech)*.

**BAB IV****: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan berbasis *financial technology (fintech)* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan bagaimanakah hubungan hukum antara para pihak dalam *financial*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*technology (fintech)* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## **BAB V : PENUTUP**

Dimana pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**


  
 UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. PT. Finansia Multi Finance

PT. Finansia Multi Finance adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang pembiayaan sejak tahun 1994 dan memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan surat No.460/KMK.017/1994 tanggal 14 September 1994.

Sejak tahun 1994 PT. Finansia Multi Finance mendirikan brand Kredit Plus dengan fokus pelayanan pembiayaan motor, mobil, dan peralatan berat. Dalam waktu beberapa tahun ini, perhatian utama Kredit Plus adalah memenuhi kebutuhan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan layanan Kredit Plus. Untuk memenuhi kedua hal tersebut, mulai 2014 Kredit Plus telah mulai proses digitalisasi dengan tujuan menjadi penyedia layanan *digital finance* terbaik di Indonesia.

Proses digitalisasi dimulai Kredit Plus dengan membangun kerjasama dengan website *e-commerce* sebagai *payment gateway*. Kemudian Kredit Plus membuat sistem pengajuan kredit secara digital dengan inovasi E-Form. Saat ini Kredit Plus sedang membangun ekosistem terintegrasi agar dapat menyediakan layanan bagi nasabah yang dapat digunakan secara mudah, cepat, dan aman. Dalam ekosistem terintegrasi tersebut nasabah dapat melakukan pengajuan kredit hingga pembayaran angsuran terakhir dari mana saja dan kapan saja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inovasi terbaru Kredit Plus adalah palfond Kredit Mu, dimana nasabah dapat mengajukan kredit limit yang dapat digunakan seperti kartu kredit di toko dan website mitra Kredit Plus. Kredit Mu memudahkan akses kredit tanpa kartu kredit, dan seluruh proses dapat dilakukan secara digital.

Produk dan layanan lain yang saat ini disediakan oleh Kredit Plus termasuk pembiayaan multi guna untuk berbagai macam produk elektronik dan furniture, dan pinjaman dana dengan agunan kendaraan untuk berbagai macam kebutuhan nasabah.<sup>13</sup>

**B. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan****a. Visi**

Menjadi perusahaan pembiayaan penyedia solusi dan layanan pembiayaan berbasis teknologi terbaik di Indonesia.

**b. Misi**

1. Menyediakan solusi dan layanan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Membangun kerangka kerja untuk setiap orang belajar, berkembang dan bekerja, menciptakan nilai dan potensi pertumbuhan.

**c. Nilai-Nilai Perusahaan**

1. Integritas.
2. Kerja sama.
3. Peduli dan bertanggung jawab.

<sup>13</sup> <https://www.kreditplus.com/profil> dilihat pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 10.28 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lakukan dengan benar dan mengembangkan diri.
5. Sikap 'pasti bisa' (*can do attitude*).
6. Kesederhanaan.
7. Rajin.<sup>14</sup>

Di provinsi Riau terdapat beberapa kantor cabang salah satunya yang berada di kantor kredit plus cabang Pekanbaru di Jl. HR. Soebrantas no 96, Kompleks Ruko Green Mansion kel. Delima kec. Tampan Pekanbaru.

### C. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012. Ada lima langkah yang dilalui Otoritas Jasa Keuangan, sebelum pada akhirnya Otoritas Jasa Keuangan menjalankan seluruh rangkaian tugasnya secara menyeluruh, antara lain:

1. 15 Agustus 2012 dibentuk tim transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap I yang bertugas untuk membantu para dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas.
2. 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non bank.

<sup>14</sup> <https://www.kreditplus.com.visimisi> dilihat pada tanggal 26 Juli 2019 pukul 10.17 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. 18 Maret 2013, dibentuk tim transisi Otoritas Jasa Keuangan tahap II yang bertugas membantu dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan pengalihan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia.
4. 31 Desember 2013, Otoritas Jasa Keuangan sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja perbankan.
5. 01 Januari 2015, Otoritas Jasa Keuangan mulai melaksanakan pengawasannya ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (PLKM).<sup>15</sup>

#### D. Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Pemerintah Indonesia berharap Otoritas Jasa Keuangan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Otoritas Jasa Keuangan juga harus mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif. Otoritas Jasa Keuangan di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan adalah :

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan secara stabil; dan

<sup>15</sup>Aufi Ramadhania Pasha, *Mengenal OJK: Sejarah ,Fungsi dan Kebijakan Strategi Terkini*, diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/amp/mengenal-ojk-sejarah-fungsi-dan-kebijakan-strategi-terkini>, pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 14.33 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

**E. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan**

- a. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
- b. Misi Otoritas Jasa Keuangan adalah :
  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel.
  2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan secara stabil; dan
  3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

**F. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan**

- a. Fungsi otoritas jasa keuangan ialah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- b. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau**

Sebagaimana biasa struktur organisasi yang ada pada suatu instansi, maka struktur organisasi pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau juga demikian, yakni sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (direktur).
2. Wakil kepala Otoritas Jasa Keuangan (deputi direktur).
3. Kepala bagian pengawasan bank (pengawas senior).
4. Kepala sub bagian pengawasan bank I (staf/pengawas junior dan pengawas pertama).
5. Kepala sub bagian pengawasan bank II (staf/pengawas junior dan pengawas pertama).
6. Kepala bagian pengawasan IKNB, pasar modal, dan EPK.
7. Kepala bagian pengawasan IKNB (staf/pengawas junior dan pengawas pertama).
8. Kepala sub bagian pengawasan pasar modal (staf/pengawas junior dan pengawas pertama).
9. Kepala sub bagian pengawasan EPK (staf).
10. Kepala sub bagian administrasi (staf, PTU, THOS (*resepsionis, driver, pramubakti, keamanan dalam, cleaning service, teknisi*)).

---

<sup>17</sup> Data riset 2019.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Lembaga Pembiayaan

Penambahan modal dalam suatu kegiatan bisnis umumnya dapat dilakukan melalui pinjaman di “lembaga” perbankan. Namun, karena lembaga ini memerlukan jaminan yang kadangkala tidak bisa dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan, maka diperlukan suatu upaya lain, yang tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya. Upaya lain tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut dengan lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut, paling tidak lembaga pembiayaan memuat dua unsur pokok, yaitu :

1. Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal.
2. Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut *non-depository financial institution*.

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, satu-satunya persamaan lembaga pembiayaan dengan perbankan adalah sama-sama melakukan kegiatan pembiayaan bagi badan usaha lainnya. Namun, perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Lembaga pembiayaan dalam melaksanakan kegiatannya tidak memungut dana dari masyarakat, sedangkan perbankan memungut dana dari masyarakat.
2. Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, sedangkan perbankan melakukan kegiatan pembiayaan hanya dalam bentuk modal finansial.
3. Lembaga pembiayaan melakukan pembiayaan kadangkala tidak memerlukan jaminan, sedangkan perbankan selalu disertai jaminan.<sup>19</sup>

Jenis-jenis lembaga pembiayaan yang dikenal adalah sebagai berikut :

1. *Leasing* (sewa guna usaha).

Kata *leasing* berasal dari kata *lease* yang berarti menyewakan. Oleh karena itu, maka yang dimaksudkan dengan *leasing* adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Perusahaannya disebut *leasing company*.

2. *Factoring* (Anjak Piutang)

<sup>19</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017), h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Factoring* yang dikenal dewasa ini pertama kali tumbuh di Amerika tahun 1889, kemudian menyebar ke Kanada sekitar tahun 1930-an sampai kemudian meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina, dan akhirnya Indonesia mulai mengenal lembaga ini pada akhir tahun 1988 sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988.

*Factoring* (anjak piutang) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Perusahaannya disebut *factoring company*.<sup>20</sup>

### 3. Modal Ventura

Istilah *ventura* berasal dari kata *venture* yang secara harfiah dapat berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan dengan usaha. Dengan demikian pengertian modal *ventura* secara sempit adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko, baik dalam bentuk penyertaan modal saham, obligasi konversi maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham.

Modal *ventura* ini merupakan suatu bentuk pembiayaan modal atau sejenisnya pada suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaannya, baik dari bank maupun dari pasar modal (melalui *go public*). Modal *ventura* juga merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan pembiayaan dan/atau penambahan modal diluar

<sup>20</sup>Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013), h. 79.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbankan. Dikatakan alternatif karena perusahaan modal ventura ini juga dapat memberikan modal, khususnya bagi badan usaha yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan modal dari perbankan. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan modal dari perbankan diperlukan adanya jaminan yang oleh perusahaan yang bersangkutan tidak bisa memenuhi. Oleh karena itu, perusahaan modal ventura merupakan satu-satunya jalan.

#### 4. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah usaha pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Perusahaannya disebut *costumer finance company*.<sup>21</sup>

#### 5. Kartu Kredit

Menurut Kartono Muhammad, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, atau alat menarik uang tunai dibank.

#### B. Perkembangan *Financial Technology (fintech)*

Istilah *fintech* berasal dari kata teknologi dan finansial. Menurut *National Digital Research Center (NDRC)* mendefinisikan *fintech* sebagai jasa keuangan yang inovatif atau inovasi dalam pelayanan finansial. Inovasi disini adalah sentuhan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi modern yang dapat membawa proses transaksi keuangan lebih mudah dan praktis.<sup>22</sup>

Perusahaan pertama di dunia yang menawarkan *peer to peer lending* berasal dari Inggris yang bernama Zopa yang berdiri pada tahun 2005. Selanjutnya, Funding Circle berdiri pada bulan Agustus 2010. Kedua perusahaan tersebut juga merupakan anggota dari *Peer To Peer Finance Association* (P2PFA). Saat itu *peer to peer lending* di Inggris bertujuan untuk menyaingi industri perbankan yang dinilai tidak mendukung untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan kecil. Tindakan tersebut telah mendapatkan kritik keras oleh berbagai pihak karena telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan *peer to peer lending* dimana hanya perusahaan *peer to peer lending* berukuran besar saja yang diberikan dukungan.

Pada tahun 2014, telah diresmikan *Financial Conduct Authority* (FCA) yang diberikan kewenangan untuk mengatur industri *peer to peer lending* di wilayah Inggris. Namun demikian, industri *peer to peer lending* tidak bisa mendapatkan perlindungan dari *Financial Services Compensation* (FSCS) yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menjamin perbankan dan nasabahnya.

Industri *peer to peer lending* di Amerika Serikat muncul satu tahun setelah di Inggris, tepatnya bulan Februari 2006. Prosper adalah perusahaan pelopornya, diikuti oleh *lending club* sebagai perusahaan berikutnya. Kedua perusahaan tersebut

<sup>22</sup> Agus Made Krisnan Ferdiana, 2019, *Understanding Fintech Through Go-Pay*, International Journal of Innovative Science and Research Technology, Volume 4 Issue 2, ISSN No -2456-2165.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermarkas di San Fransisco, California. Dikawasan asia, tepatnya di China, model bisnis *peer to peer lending* mulai memasuki pasar berkisar di tahun 2007. Namun praktik *peer to peer lending* sebenarnya sudah dilakukan masyarakat China sejak lama, secara offline, dari berabad-abad yang lalu. Menurut data yang dirilis Straits Times tahun 2014, terdapat sekitar 1600 platform *peer to peer lending* di China. Saat itu, China adalah pasar *peer to peer lending* terbesar didunia melampaui Inggris dan Amerika.

Selain Inggris, Amerika, dan China, model bisnis *peer to peer lending* juga merambah ke berbagai negara lain diantaranya Australia (2012), New Zealand (2014), India (2012), dan Kanada (2015). Industri ini baru muncul di Indonesia beberapa tahun belakangan. Istilah *peer to peer lending* memiliki padanan istilah di Indonesia yang dapat disebut sebagai “pinjaman dalam jaringan” atau “pinjaman daring” atau “pindar”.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pindar di Indonesia mulai muncul tahun 2015. Kemunculannya didorong oleh perkembangan teknologi informasi, bermunculannya pindar di beberapa negara dan rendahnya akses pendanaan ke lembaga jasa keuangan yang telah ada. Layanan pindar dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan membuka akses bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan atau lembaga pendanaan lainnya.<sup>23</sup> Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi

<sup>23</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Seri Literasi Keuangan)*, (Jakarta, E-Book, 2016), h. 239-241.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah merambah ke berbagai aspek kehidupan di era digital ini, salah satunya adalah penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang umumnya disebut sebagai *financial technology (fintech)*. Berbagai definisi *fintech* telah dijelaskan oleh banyak pihak, tetapi secara umum *fintech* dapat didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan. Penyedia layanan keuangan mengembangkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar keuangan tradisional dengan mengembangkan aplikasi baru yang dapat digunakan mulai untuk pembayaran hingga aplikasi yang lebih kompleks untuk *artificial intelligence* dan *big data*.

*Fintech* atau keuangan digital sebagai jasa keuangan yang dilahirkan melalui infrastruktur digital, termasuk telepon seluler dan internet dengan penggunaan yang minim dari uang tunai dan cabang bank tradisional. Telepon seluler, komputer, atau kartu kredit yang digunakan lewat *Point of Sale (POS) devices* menghubungkan individu dan pelaku bisnis ke infrastruktur pembayaran digital sehingga memungkinkan transaksi tak terbatas antara semua pihak.<sup>24</sup> Definisi tersebut secara luas mencakup :

- a. Semua tipe jasa keuangan, termasuk pembayaran, tabungan, kredit, asuransi, dan semua produk keuangan.
- b. Semuan tipe pengguna, termasuk individu pada semua level pendapatan, pelaku usaha pada semua skala usaha, dan pemerintah, serta

<sup>24</sup> Berry A. Harahap, Pakasa Bang Ilham, dkk, 2017, *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi*, Working Paper Bank Indonesia, h.5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Semua tipe penyedia jasa keuangan, termasuk bank, penyedia jasa pembayaran, institusi keuangan lainnya, perusahaan telekomunikasi, *fintech star up, retailer*, dan usaha lainnya.

Sekretaris Jendral Asosiasi Pengawas Asuransi Internasional, sebuah organisasi dalam anggota *Financial Stability Board (FSB)* dewan stabilitas keuangan mendefinisikan *fintech* sebagai teknologi yang memungkinkan inovasi dalam jasa keuangan. Hal itu memunculkan model bisnis, aplikasi, proses, dan produk baru dalam jasa keuangan yang dapat berdampak material pada pasar keuangan dan institusi serta penyediaan layanan keuangan.

*Fintech* adalah fenomena global, lahir dari suatu persimpangan antara perusahaan-perusahaan keuangan dan penyedia teknologi, yang mencoba untuk memanfaatkan pada teknologi digital dan analisis untuk maju dalam finansial servis dalam memanfaatkan ekonomi dengan menargetkan para konsumen lama.<sup>25</sup> Teknologi finansial merepresentasikan perusahaan yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi yang modern dan inovatif. Sebagai contohnya adalah pendatang baru di pasar keuangan yang kemudian menawarkan produk-produk berbasis internet dengan didukung oleh adanya sebuah aplikasi. *Fintech* pada umumnya bertujuan untuk menarik konsumen dengan produk dan layanan yang lebih *user friendly*, efesien, transparan, dan otomatis berbeda dengan layanan keuangan tradisional jika dibandingkan dengan yang tersedia saat ini.

<sup>25</sup> Paolo Sironi, *Fintech Innovation From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification*, (UK :The Willey Finance Series, 2016).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Industri *fintech* terdapat empat segmen utama sesuai dengan model bisnis mereka. Seperti pembiayaan, pengelolaan aset, pembayaran, serta fungsi *fintech* lainnya.<sup>26</sup> Berikut tabel kategori mengenai segmen *fintech* :

**Tabel III. 1**  
**Kategori Segmen *Fintech***

<i>Fintech</i>			
Pembiayaan	Pengelolaan aset	Pembayaran	Fungsi <i>fintech</i> lainnya
1. <i>Crowdfunding</i>	1. <i>Social trading</i>	1. <i>Alternative payment methods</i>	1. <i>Insurance</i>
2. <i>Credit and factoring</i>	2. <i>Robo-advice</i>	2. <i>Blockchain and cryptocurrencies</i>	2. <i>Search engines and comparison sites</i>
	3. <i>Personal financial management (PMF)</i>	3. <i>Other fintech</i>	3. <i>Technology, IT and infrastruktur</i>
	4. <i>Investment and banking</i>		4. <i>Other fintech</i>

Sektor pembiayaan (*financing*) mencakup *fintech* yang menyediakan pembiayaan bagi individu dan pelaku bisnis. Segmen ini dapat dibagi lagi menjadi *fintech* yang penawarannya didasarkan pada partisipasi sejumlah besar *contributor* dan mereka yang menawarkan layanan anjak piutang atau kredit tanpa partisipasi orang banyak (subsektor kredit dan anjak piutang).

Segmen manajemen aset (*aset management*) mencakup *fintech* yang menawarkan saran, pengelolaan aset, dan indikator agregat dari *personal wealth*.

<sup>26</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu segmen pada manajemen aset adalah perdagangan sosial, adalah bentuk investasi yang investornya dapat mengamati, mendiskusikan, dan menyalin strategi investasi atau portofolio dari anggota jaringan sosial lainnya.

Segmen pembayaran (*payments*) adalah istilah umum yang berlaku untuk *fintech* yang aplikasi dan layanannya menyangkut transaksi pembayaran nasional dan internasional. Di bawah payung ini termasuk didalamnya adalah subsegmen *blockchain* dan *cryptocurrency* yang mencakup *fintech* yang menawarkan mata uang virtual (*cryptocurrency*) sebagai alternatif dari uang biasa, seperti cara pembayaran legal yang dimungkinkan untuk menyimpan, menggunakan, dan menukar. Seperti contohnya Go-Pay, OVO, LinkAja, DANA, dan lain sebagainya.

Segmen *fintech* lainnya yang menggambarkan bisnis *fintech* yang tidak dapat diklasifikasikan oleh tiga fungsi bank tradisional lainnya, yaitu transaksi pembiayaan, pengelolaan aset, dan pembayaran. *Fintech* menawarkan asuransi atau memfasilitasi akuisisi, termasuk dalam subsegmen asuransi. *Fintech* ini sering juga disebut *insurtechs* karena menawarkan asuransi *peer to peer*, yaitu sekelompok pemegang polis berkumpul dan menganggap tanggung jawab kolektif dalam kasus kerusakan. Selanjutnya, *fintech* dari mesin pencari dan situs perbandingan subsegmen yang memungkinkan pencarian berbasis internet dan perbandingan produk keuangan atau layanan keuangan termasuk didalam *fintech* lainnya. *Fintech* yang menyediakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solusi teknis untuk penyedia jasa keuangan termasuk dalam subsektor teknologi, IT, dan infrastruktur.<sup>27</sup>

### C. Konsep *Fintech* dan Implementasinya di Indonesia

Tidak ada yang memungkiri bahwa saat ini gelombang revolusi digital terus berlangsung. Kemajuan yang dianggap sebagai disrupsi inovatif tersebut telah mengubah wajah dunia melalui cara-cara melakukan interaksi sosial dan hubungan personal. Seandainya boleh dibandingkan, kemajuan digitalisasi ini berjalan lebih cepat daripada perkembangan sektor lain. Secara lebih ekstrim dapat dikatakan bahwa dewasa ini jumlah orang yang memiliki telepon seluler (ponsel) mungkin jauh lebih besar daripada mereka yang memiliki akses terhadap listrik atau air bersih. Penetrasi atau difusi gelombang digital telah merangsang masuk ke hampir semua aspek kehidupan dan ekonomi masyarakat dunia, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ritel, hotel, dan bahkan keuangan.

Bagi sektor keuangan, inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru, karena antara teknologi keuangan memiliki sejarah simbiosis yang panjang, sehingga secara inheren teknologi keuangan (*fintech*) juga bukan merupakan pengembangan baru bagi industri jasa keuangan. Meskipun demikian, intensitas pembahasan dan kajian tentang keterkaitan keduanya cukup tinggi akhir-akhir ini, terutama karena penetrasi *fintech* itu sangat cepat.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 6-7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang fintech. Secara umum dan dalam arti luas, fintech menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi-solusi keuangan. Secara spesifik, fintech didefinisikan sebagai aplikasi teknologi digital untuk masalah-masalah keuangan. Dalam pengertian luas, fintech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Fintech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, progres atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.

Evolusi fintech yang terlihat akhir-akhir ini sesungguhnya berawal dari inovasi karti kredit pada tahun 1960-an, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri (*automatic teller machine*, atm) pada tahun 1970-an, kemudian disusul dengan munculnya *telephone banking* pada tahun 1980-an dan beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi pada tahun 1990-an. Selanjutnya, muncul *internet banking* yang kemudian mendorong eksisnya perbankan tanpa cabang (*branchless banking*) dan aktivitas perbankan yang dilakukan jarak jauh. Lalu muncul teknologi perangkatat seluler yang lebih memudahkan dalam transaksi keuangan. Perubahan tersebut telah mendorong munculnya pembiayaan dan intermediasi langsung, yang diprediksi akan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggantikan pembiayaan tidak langsung dan intermediasi keuangan yang mahal dan tidak efisien.

Ada dua faktor utama yang menggerakkan terjadinya evolusi dalam inovasi teknologi keuangan, yaitu kekuatan permintaan (*demand side*) dan kekuatan penawaran (*supply side*). Faktor yang bersumber dari sisi permintaan antara lain :

1. Pergeseran prefensi konsumen yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap inovasi. Akses internet yang mudah dan kemampuan pengguna jaringan internet bertransaksi *real time* telah mendorong ekspektasi yang tinggi terutama menyangkut kenyamanan, kecepatan, biaya yang lebih murah, dan kemudahan penggunaan layanan keuangan. Selain itu, perubahan preferensi juga terjadi karena pengaruh faktor demografi yang mendorong permintaan.
2. Evolusi teknologi dalam layanan keuangan berkembang dengan pesat dan dengan cara-cara baru serta memanfaatkan model-model bisnis yang berbeda. Seperti model bisnis yang menggunakan teknologi *big data*, *artificial intelligence*, *machine learning*, *cloud computing* dan *biometrics*. Selain ini, dengan inovasi yang agak berbeda juga telah diterapkan teknologi baru, seperti DLT. Dengan model bisnis dan aplikasi teknologi baru memungkinkan munculnya pemain-pemain baru di sektor jasa keuangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjadinya evolusi global dalam inovasi teknologi keuangan juga turut mempengaruhi perkembangan fintech di Indonesia. Hanya saja indikator yang tersedia dan dapat digunakan untuk melihat konfigurasi fintech di Indonesia saat ini masih terbatas. Walaupun belum banyak jenis pilihan model fintech yang tersedia di Indonesia, namun hampir dapat dipastikan bahwa keberadaan fintech akan memberikan warna dan membawa implikasi pada layanan jasa keuangan dan para pihak (*stakeholders*) di dalam negeri.

Bagi layanan keuangan, fintech memiliki potensi untuk “memecah” dan merestrukturisasi jasa keuangan yang ada. Keberadaan fintech bisa memecah konsentrasi yang terjadi di pasar keuangan sehingga *market share* akan terdistribusi antar pesaing yang menawarkan jasa layanan yang sama. Akibatnya, tidak ada lagi dominasi lembaga perantara keuangan tertentu di pasar keuangan dan kompetisi yang terjadi berpotensi menurunkan tingkat harga jasa layanan keuangan. Selain itu, fintech juga akan mengubah kontestabilitas dalam jasa layanan keuangan karena relatif murah biaya bagi pendatang baru.

Keberadaan fintech membuka peluang yang lebih besar bagi konsumen-konsumen rumah tangga dan kalangan dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mengakses jasa keuangan. Selain itu fintech juga menawarkan kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya yang lebih murah serta kenyamanan bagi konsumen dalam menikmati layanan jasa keuangan. Keberadaan fintech selain membawa manfaat juga berpotensi membawa sejumlah resiko. Resiko

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fintech yang paling awal ditanggung oleh konsumen, terutama resiko keamanan data (*cyber risks*), privasi dan kepemilikan data serta tata kelola data. Resiko ini bisa muncul karena kerentanan sistem dan proses yang berbasis komputer yang saling terkait dan dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* untuk kesenangan atau niat kriminal..

Resiko yang dihadapi konsumen tentu saja turut berpengaruh pada operasional perusahaan fintech, infrastruktur pasar keuangan, atau bahkan sektor-sektor yang rentan terhadap guncangan. Kristalisasi resiko-resiko tersebut lebih lanjut bisa memiliki dampak sistemik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Dengan berbagai implikasi tersebut, peranan regulator menjadi sentral terutama dalam merancang dan menerapkan regulasi keuangan yang proporsional. Keberadaan fintech membutuhkan regulasi yang tidak lagi semata-mata tergantung pada entitas atau intermediari, melainkan memberikan proporsi yang lebih pada regulasi berbasis aktivitas. Langkah yang ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, paling tidak bisa menjadi bukti awal adanya proporsi khusus untuk regulasi jasa keuangan berbasis aktivitas di Indonesia. Kendati demikian, tujuan regulasi tersebut lebih luas. Selain ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional terkait dengan pencegahan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di lain pihak Bank Indonesia juga telah menetapkan regulasi bagi para penyelenggara fintech yang aktivitasnya terkait dengan sistem pembayaran. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan ketentuan pelaksanaannya dalam peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Salah satu point penting yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah ditetapkannya kewajiban para penyelenggara fintech di bidang jasa sistem pembayaran keuangan untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia. Selain itu, para penyelenggara diwajibkan untuk melakukan uji coba terbatas atas produk layanan teknologi dan/atau model bisnis keuangannya dalam *regulatory sandbox*. Pendekatan *regulatory sandbox* ini akan membantu regulator memahami resiko yang mungkin muncul jika suatu produk fintech digunakan secara luas, namun berada dalam lingkungan yang terkendali. Ini akan membantu penyelenggara fintech, terutama perusahaan pemula (*start up*) untuk menguji produk tanpa harus mengganggu biaya penuh regulasi atau menghadapi tindakan penegakan hukum.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Perbandingan *Financial Technology (fintech)* dengan Bank Konvensional

Meskipun *fintech* digadang-gadang akan menjadi pengganti bank konvensional dalam fasilitator masyarakat dalam bertransaksi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa bank konvensional masih lebih unggul karena faktor berikut :

1. Bank konvensional telah menjadi tulang punggung dari perekonomian dunia dan telah memiliki nasabah yang sudah tergolong loyal terhadap layanan yang diberikan oleh bank.
2. Bank konvensional memiliki kantong yang lebih tebal yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat menjadi sumber pemasukan seperti memberikan pinjaman berbunga dan lainnya.
3. Bank konvensional memiliki infrastruktur dan layanan nasabah yang telah mapan sehingga bank konvensional dapat menyediakan layanan untuk nasabah jika ingin bertanya atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan bank tersebut.
4. Bank konvensional memiliki data yang sangat besar yang berasal dari nasabah-nasabah, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Data-data tersebut dapat diolah sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan berjalannya bisnis bank konvensional.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Alvin Abyan, *Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial*, (Depok, Universitas Indonesia, 2019), h. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Perjanjian Kredit dalam Sistem Perbankan

Pengaturan tentang kredit di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum perbankan. Pengertian tentang kredit sendiri ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut undang-undang Perbankan, yaitu :<sup>29</sup>

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan KUHPerdata antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.”*

Berkaitan dengan pengertian kredit diatas menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 72/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk :

- (a) Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- (b) Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak-piutang.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Usaha perbankan untuk memberikan kredit ini sesuai dengan usaha bank yang khusus bergerak di bidang jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 17 undang-undang Perbankan, bank mempunyai kegiatan usaha khusus yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Menberikan kredit.
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>30</sup> Dari pengertian kredit tersebut, maka didapatkan elemen-elemen kredit sebagai berikut :

1. Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.
2. Penyedia atau pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan.
3. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.

<sup>30</sup> Pasal 1 butir 12 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam jangka waktu tertentu.
5. Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan hutang disertai sejumlah uang atau bunga atau imbalan. Bagi Bank Syari'ah atau Bank Muamalat, pengembalian hutang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga.<sup>31</sup>

Suatu pemberian kredit akan dilandasi oleh suatu perjanjian kredit, dimana perjanjian pinjam-meminjam menjadi dasar acuan dalam perjanjian kredit.

KUHPerdata sendiri tidak mengatur secara khusus tentang perjanjian kredit.

KUHPerdata hanya mengatur tentang hutang yang terjadi karena peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756 KUHPerdata yang selengkapanya berbunyi

..<sup>32</sup>

*“Hutang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan terjadi sesuatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah uang yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu.”*

Dalam praktik bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dan bank lainnya tidaklah sama. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktik biasanya dicantumkan definisi istilah-istilah

<sup>31</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta, Alfabeta, 2003), h. 95-96.

<sup>32</sup> Pasal 1756 KUHPerdata.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan digunakan dalam perjanjian, jumlah dan batas waktu peminjaman, serta pembayaran kembali pinjaman, penetapan bunga dan dendanya bila debitur lalai. Keseluruhan hal-hal ini kemudian dibakukan sehingga akhirnya terbentuklah perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank. Dalam perjanjian baku diharuskan adanya keseimbangan antara para pihak. Klausul tidak boleh diletakkan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara mudah, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Unsur-unsur kredit terdiri atas :<sup>33</sup>

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan

<sup>33</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Penada Media Group, 2009), h.58-59.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik per kreditan.

Dengan demikian unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabahnya sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain : jelasnya tujuan peruntukan kredit, dan dengan adanya benda jaminan atau agunan. Selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain yaitu unsur waktu, unsur resiko, dan unsur prestasi.<sup>34</sup>

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan salah satu pihak yang terikat dengan perjanjian baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta

---

<sup>34</sup> Ibid, h. 59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan<sup>35</sup>. Terdapat ganti rugi yang dikarenakan wanprestasi, yaitu :

1. Komponen kerugian. Komponen kerugian yang dapat diberikan berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata yang terdiri dari tiga unsur, yakni ongkos atau biaya, kerugian karena kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian, bunga.
2. Mulai diwajibkannya ganti rugi. Mulai diwajibkannya suatu pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata adalah sejak dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalihkan kewajibannya, atau terhadap sesuatu yang harus dibuat atau diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana debitur dapat membuat atau memberikan. Berdasarkan pasal ini ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu jika dalam perjanjian tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti rugi dimulai dari terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

<sup>35</sup> Pasal 1238 KUHPerdata.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kerugian bukan karena alasan *force majeure*. Yang tergolong ke dalam *force majeure* adalah karena sebab-sebab yang tidak terduga (Pasal 1244 KUHPerdara), karena keadaan memaksa (Pasal 1245 KUHPerdara), karena perbuatan tersebut dilarang (Pasal 1245 KUHPerdara).
4. Kerugian dapat diduga. Dalam Pasal 1247 KUHPerdara kerugian yang ditimbulkan harus diharapkan akan terjadi atau sedianya sudah dapat diduga sejak saat dilakukannya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Ketentuan seperti ini tidak berlaku jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
5. Kerugian merupakan akibat langsung. Berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdara terhadap suatu kontrak hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut.
6. Ganti rugi yang ditetapkan dalam kontrak. Apabila dalam suatu kontrak ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut wanprestasi, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak. Tidak boleh dilebihi atau dikurangi berdasarkan Pasal 1249 KUHPerdara.
7. Ganti rugi terhadap perikatan tentang pembayaran sejumlah uang. Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara, maka berlaku ketentuan seperti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ganti rugi hanya terdiri dari bunga yang ditetapkan oleh undang-undang, pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian terhadap kreditur, pembayaran ganti rugi tersebut terhitung sejak dimintakannya di pengadilan oleh kreditur, kecuali jika ada perundang-undangan yang menetapkan bahwa ganti rugi terjadi karena hukum.<sup>36</sup>

### **F. Penjelasan Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai *Financial Technology (fintech)***

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik yang dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Oleh karena itu, regulasi kegiatan bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai sudah sangat mendesak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan Pengguna, penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Peraturan OJK ini antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan Pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data Pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai pelaksanaan pembiayaan berbasis *financial technology (fintech)* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pembiayaan berbasis *financial technology (fintech)* penyelenggara harus dapat memberikan informasi yang jelas kepada penerima pinjaman, sebagai mana yang telah diuraikan dalam Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yakni penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Jika penyelenggara tidak memberikan informasi yang jelas sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 30 tersebut maka penyelenggara dapat dikenakan suatu perbuatan wanprestasi, dimana wanprestasi sendiri adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan salah satu pihak yang terikat dengan perjanjian baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam hal hubungan hukum yang terjadi antara para pihak maka hubungan hukum pada *peer to peer lending* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ) harus dibedakan dengan hubungan hukum para pihak dalam perbankan. Agar tidak ada pelanggaran bank gelap (*shadow banking*). Oleh karena itu, hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara *peer to peer lending* haruslah bukan hubungan penyimpanan dana melainkan hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dalam hal ini merupakan hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Kepastian hubungan hukum antara para pihak dalam *peer to peer lending* juga akan memberikan kedudukan hukum yang sah bagi penyelenggara *peer to peer lending*.

**B. Saran**

1. Bagi penyelenggara sebaiknya memberikan informasi yang jelas kepada penerima pinjaman, agar tidak ada yang dirugikan diantara para pihak.
2. Bagi penerima pinjaman sebaiknya lebih teliti dan cermat apabila ingin melakukan kegiatan pembiayaan berbasis teknologi informasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhairi, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Zuhairi, Asikin Zainal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ayub, Zaeni. 2017. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fitri, Munir. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghozali, Djoni S, Usman Rachmadi. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Penada Media Group.
- Imaryadi Sri Neni. 2013. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardik, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Seri Literasi Keuangan)*. Jakarta: Ebook.
- Puspita, Yan Prandya. 1997. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Siro, Paolo. 2016. *Fintech Innovation From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification*. UK: The Willey Finance Series.
- Soekanto Sarjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutanto. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayuh Muhammad Alvin. 2019. *Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial* (Depok, Universitas Indonesia).

Prasada Agus Made Krisnan. 2019. *Understanding Fintech Through Go-Pay*. International Journal of Innovative Science and Research Technology. Volume 4 Issue 2, ISSN No -2456-2165.

Harshini Berry A. Ilham Pakasa Bang. 2017. *Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter dan Makroekonomi*, Working Paper Bank Indonesia.

Harmono Ratna, Purnama J. 2018. *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 25. Nomor 2 : 320-338.

Harunilswi. 2017. *Perlindungan Hukum dan Perlindungan Sengketa Bisnis Jasa Fintech*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 14. Nomor 03 : 333-346.

Edwan Muchlis, 2018, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Medan*. Jurnal At-Tawasul. Volume. III, No.2 : 335 – 357.

Vulan Veqi Rahma. 2017. *Fianancial Technology (Fintech) A New Transaction In Future*. Jurnal of Electronical Engineering and Computer Sciences. Volume 2. Nomor 1 ISSN : 2528-0260.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/48/PBI/2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Eksteren.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Internet

<http://www.kreditplus.com/multiproduk>

<http://www.kreditplus.com/profil>

<http://www.kreditplus.com/visimisi>

Au'adiah Hanika Risha, *Mengenal OJK: Sejarah, Fungsi dan Kebijakan Strategi Terkini*, Cases dari <https://www.cermati.com/artikel/amp/mengenal-ojk-sejarah-fungsi-dan-kebijakan-strategi-terkini>.

<http://www.cekkembali.com/fintech/2/>

<http://www.finansialku.com/kelebihan-dan-kelemahan-fintech/>

[www.jurnal.id](http://www.jurnal.id)

UIN SUSKA RIAU





## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja tips atau trik bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan fintech agar tidak mengalami kerugian atau tidak tertipu ?
2. Apa saja kelebihan atau kelemahan jika menggunakan layanan fintech?
3. Apakah dengan adanya layanan fintech ini dapat memperkecil niat masyarakat untuk melakukan pinjaman pada bank konvensional?
4. Apakah resiko dalam menggunakan fintech ini lebih besar atau kecil dibandingkan dengan menggunakan layanan pada perbankan?
5. Apakah pelaksanaan fintech saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada?
6. Apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya financial technology (fintech) ini?

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Angket Penelitian

Responden yang terhormat

Saya memohon kesediaan saudara/i untuk mengisi jawaban pertanyaan kuesioner penelitian ini. Informasi yang saudara/i berikan adalah sebagai data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi saya. Informasi yang saudara/i berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian ini. Atas bantuan saudara/i saya ucapkan terima kasih.

#### 1. Identitas Responden

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

A. Silanglah salah satu jawaban berdasarkan pengalaman saudara/i

1. Apakah saudara/i mengetahui financial technology (fintech) contoh : OVO, LinkAja, DANA, Go-Pay, *Mobile Banking*, dan pinjaman online ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Apakah saudara/i tertarik untuk menggunakan financial technology (fintech)?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Manakah yang lebih mudah proses peminjaman melalui financial technology (fintech) atau pada perbankan ?
  - a. Fintech
  - b. Perbankan
4. Apakah dengan adanya layanan financial technology tersebut memberikan manfaat pada kehidupan saudara/i?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Apakah saudara/i pernah mengalami kerugian pada saat mengajukan pinjaman melalui financial technology (fintech)?
  - a. Pernah
  - b. Tidak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Berdasarkan pengalaman saudara/i menggunakan financial technology (fintech), coba ceritakan dengan singkat bagaimana keuntungan dan kerugian yang saudara/i alami !

- Keuntungan :

- Kerugian :

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI,**

Skripsi dengan *Pelaksanaan Pembiayaan Berbasis Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus), yang ditulis oleh :

Nama : **SITI SHOLIAH**  
NIM : **11527200020**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Mhd. Kastulani, SH., MH**

Sekretaris  
**Mur Hidayat, SH., MH**

Penguji I  
**Ilham Akbar, SH., MH**

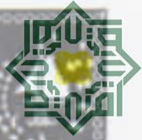
Penguji II  
**Peri Pirmansyah, SH., MH**

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Erni, S.Sos., MM**

NIP. 19680226 199103 2 002





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/24275  
TENTANG



032010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.C/FAH/PP.003/5756/2019 Tanggal 12 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : SITI SHOLIAH  |
| 2. NIM / KTP         | : 11527200020   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN PEMBIYAYAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH) BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA OTORITA JASA KEUANGAN PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan di Pekanbaru
- ③ Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

: S-1371/KO.053/2019  
:  
: Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian

06 November 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Rimba Panjang, Kecamatan Tambang  
Kabupaten Kampar

Menunjuk surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/24275 Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi atas Surat Permohonan Pra Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor:Un.04/04F.LI/PP.00.9/5756/2019, dengan ini kami sampaikan bahwa Sdri. Siti Sholihah salah satu mahasiswi Saudara telah melaksanakan penelitian melalui mekanisme wawancara di Kantor OJK Provinsi Riau pada bulan Oktober 2019 dengan narasumber yaitu Sdr. Angga Pramasto selaku Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi (S1) Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan  
Provinsi Riau

  
Yusri





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM YANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA PT. FINANSIA MULTI FINANCE (KREDIT PLUS), ditulis oleh saudara :

Nama : SITI SHOLIAH  
NIM : 11527200020  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa / 13 Agustus 2019  
Narasumber : HELEN LAST FITRIANI, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha

Erni, S. Sos., MM  
NIP. 19600226 199103 2 002

Pekanbaru, 19 Agustus 2019  
Narasumber

Helen Last Fitriani, SH, MH  
NIK. 130811034

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/4130/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
menegaskan bahwa :

Nama : SITI SHOLIAH  
NIM : 11527200020  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 28 MARET 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 9 Mei 2019

Dekan,

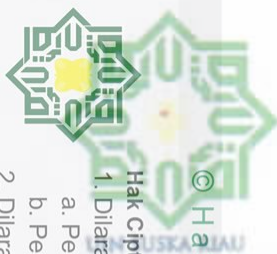


Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK

Penelitian kelompok yang berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Promosi  
Ata Penjualan Produk Obral Yang Disertai Informasi Yang Tidak Jelas (Studi Kasus  
Ramayana Robinson, Jl. HR. Subrantas, Panam, Kelurahan Sidomulyo Barat,  
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru)". Yang disusun oleh:

1. ERZA FITRIYAH : 11527203235
2. JIHAN FAUZIAH : 11527203054
3. SITI SHOLIAH : 11527200020
4. PUTRA YOGA : 11527104863
5. MUHAMMAD ZULFAN ARIF : 11527102482

Telah diberikan bimbingan berupa arahan dan perbaikan seperlunya, maka penelitian  
kelompok dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi.

Pekanbaru, 15 Januari 2019

Pembimbing,

UIN SUSKA RIAU

Hi. NURAINI SAHU, S.H., M.H.

NIP. 19590711 199503 2 001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS

Assalamu'alaikum Wr. Wb



**Siti Sholihah**, lahir pada tanggal 9 Agustus 1997 di Delima Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Bapak Sukarno dan Ibu Darmi.

Pendidikan penulis diawali dengan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselesaikan pada tahun 2003 di TK Delima Jaya. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada SDN 010 Delima Jaya yang diselesaikan pada tahun 2009. Pendidikan Menengah Pertama pada Madrasah Tsanawiyah Dar el Hikmah Pekanbaru yang diselesaikan pada tahun 2012 dan Pendidikan Menengah Atas pada Madrasah Aliyah Dar el Hikmah Pekanbaru yang diselesaikan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Magang/PKL pada Pengadilan Negeri Kelas II Pelalawan. Dan juga telah melaksanakan Pengabdian Masyarakat (Kukerta) di Desa Buana Bhakti, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak pada tanggal 16 Juli s/d 31 Agustus 2018.

Pada tanggal 21 November 2019 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) melalui sidang munaqasyah Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.